

**MODEL PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT BERDASARKAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA**

Zhibran Rachman Mansyur
NPP. 29.1704
*Asdaf Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
Program Studi Kebijakan Publik*

Email:123dssoftaza@gmail.com

ABSTRACT

Background: This research is motivated by the interest of researchers regarding the implementation of the Electronic-Based Government System in the Ternate City Government, where in its implementation there are a number of problems so that the description regarding the implementation of the Electronic-Based Government System by the Ternate City Government is not optimal. **Purpose:** This study aims to determine how the Implementation of an Electronic-Based Government System in the Ternate City Government is seen from the PeGI maturity level model which consists of 5 dimensions: Policy, Institutional, Infrastructure, Application, and Planning. **Method:** This study uses a qualitative method and a descriptive approach. The informants in this study consisted of: the Head of the Information Communication and Encryption Service of Ternate City, the Secretary of the Ternate City of Information Communication and Encryption Service, the Head of the Encryption and Data Processing Division of the Ternate City of Information Communication and Encryption Service, the Head of the Informatics Division of the Ternate City of Information Communication and Encryption Service, and the head of the Regional Assets Division of the Ternate City Financial and Regional Asset Management Agency. Data were obtained from research results through library research and field studies, namely, documentation and interviews with informants. **Result:** The results of the study indicate that the implementation of the Electronic-Based Government System carried out by the Ternate City Government is still immature. This can be seen based on five dimensions, namely, Policy, Institutional, Infrastructure, Application, and Planning in the PeGI maturity level model that has not been running well. **Conclusion:** Overall, the conclusion is the planning related to the implementation of the Electronic-Based Government System in the Ternate City Government is not yet mature, where there is no master plan or implementation guideline specifically prepared by the Ternate City Government. In connection with these findings, the researcher suggests to the Ternate City Government to again make policy improvements in the form of derivative rules based on presidential regulations and the SPBE master plan in supporting the implementation of SPBE.

Keywords : Electronic-Based Government System, Implementation, City of Ternate

ABSTRAK

Latar Belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti mengenai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Ternate, dimana dalam penyelenggaraannya terdapat sejumlah permasalahan sehingga gambaran terkait penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Pemerintah Kota Ternate tidak optimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Model Peningkatan E-Government Berdasarkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dilihat dari model tingkat kematangan PeGI yang terdiri dari 5 dimensi : Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari : Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Ternate, Sekretaris Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Ternate, Kepala Bidang Persandian dan Pengolahan Data Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Ternate, Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Ternate, dan Kepala Bidang Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate. Data diperoleh dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan kepada informan. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate masih belum matang. Hal ini dilihat berdasarkan lima dimensi yaitu, Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan pada model tingkat kematangan PeGI belum berjalan dengan baik. **Kesimpulan:** Secara keseluruhan, kesimpulan dari penelitian ini adalah perencanaan terkait penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Ternate belum matang, dimana belum ada masterplan atau pedoman penyelenggaraan yang secara khusus disusun oleh Pemerintah Kota Ternate. Sehubungan dengan temuan tersebut maka peneliti menyarankan kepada Pemerintah Kota Ternate agar kembali melakukan perbaikan kebijakan berupa aturan turunan berdasarkan peraturan presiden serta masterplan SPBE dalam menunjang penyelenggaraan SPBE.

Kata Kunci : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Penyelenggaraan, Kota Ternate

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan e-government di Indonesia dimulai pada awal era reformasi dimana Pemerintah mengambil tindakan dengan menerbitkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Tujuan dari pengembangan e-government di Indonesia adalah menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan efisien, melalui dua aktivitas yaitu : (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah negara. Instruksi ini merupakan langkah awal pemerintah dalam menerapkan e-government, yang selanjutnya seiring waktu penyelenggaraannya dikombinasikan dengan konsep desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga e-government dapat di terapkan di seluruh daerah di Indonesia.

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden tentang e-government, pemerintah telah banyak melakukan upaya dalam menerapkan e-government di Indonesia, dengan harapan akan terwujudnya penyelenggaraan secara menyeluruh mulai dari tata kelola pemerintahan hingga pada pelayanan pemerintah. Akan tetapi, yang terjadi malah sebaliknya, dimana antusiasme sektor pemerintah semakin tinggi diawal namun demikian trend penggunaan menjadi semakin

menurun. Hal ini sebagaimana dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait peringkat e-government tiap negara di dunia atau dikenal dengan EDGI (E-Government Development Index). Berikut grafik tren peringkat EDGI Indonesia dari tahun ke tahun sejak pertama kali dikeluarkannya Instruksi Presiden tentang penyelenggaraan e-government di Indonesia:

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Hal tersebut menunjukkan ada masalah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kota Ternate, sehingga menjadi menarik untuk diteliti bagaimana Model Pemingkatan E-Government Berdasarkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut menjadi penting dilakukan mengingat Kota Ternate merupakan daerah perkotaan dengan infrastruktur pendukung yang memadai dan perkembangan teknologi informasi yang sudah masif, serta pentingnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Sehubungan dengan tema diatas, telah banyak dilakukan penelitian serupa seperti halnya oleh Muhammad Alif Rizky pada tahun 2019 dengan judul “Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Lumajang Menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan pedoman evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Evaluasi SPBE, untuk menggambarkan tingkat kematangan serta predikat dari penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Lumajang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu Penelitian Abd. Aziz Bouty, Moh. Hidayat Koniyo, dan Dian Novian pada tahun 2019 dengan judul “Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus Di Pemerintah Kota Gorontalo)”. Puji Rahayu dan Dana Indra Sensuse pada tahun 2017 dengan judul “Penilaian Implementasi e-Government di PUSTEKOM Kemendikbud berbasis metode PEGI”. Muhammad Alif Rizky pada tahun 2019 dengan judul “Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Lumajang Menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE”. dan terakhir penelitian Wildan Zainul Faki pada tahun 2019 dengan judul “Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Situbondo Menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE” Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan. Adapun perbandingan terdapat pada metode dan teori yang digunakan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Sehubungan dengan tema diatas, telah banyak dilakukan penelitian serupa seperti halnya oleh Muhammad Alif Rizky pada tahun 2019 dengan judul “Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Lumajang Menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan pedoman evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Evaluasi SPBE, untuk menggambarkan tingkat kematangan serta predikat dari penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Lumajang.

Kemudian, penelitian selanjutnya oleh Wildan Zainul Faki pada tahun 2019 dengan judul “Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah

Kabupaten Situbondo Menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE”. Dalam penelitian ini masih sama dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan pedoman evaluasi SPBE berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB, namun terdapat perbedaan pada lokus penelitian. Selanjutnya, penelitian oleh Abd. Aziz Bouty, Moh. Hidayat Koniyo, dan Dian Novian pada tahun 2019 dengan judul “Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus Di Pemerintah Kota Gorontalo)”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model tingkat kematangan menurut Hiller dan Belanger, untuk mengevaluasi penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Gorontalo. Terdapat juga penelitian oleh Puji Rahayu dan Dana Indra Sensuse pada tahun 2017 dengan judul “Penilaian Implementasi e-Government di PUSTEKOM Kemendikbud berbasis metode PEGI”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model tingkat kematangan PeGI untuk menilai penyelenggaraan e-government, akan tetapi lokus penelitian ini berupa Kementerian dan bukan merupakan Pemerintah Daerah.

1.5. Tujuan.

Adapun tujuan utama dari penelitian yang akan dicapai adalah untuk mendeskripsikan mengenai Model Pemingkatan E-Government Berdasarkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

II. METODE

Para Dosen sekalian untuk menjawab rumusan masalah saya menggunakan teori Model PeGI membagi penyelenggaraan SPBE atau e-government kedalam 5 (lima) dimensi, yaitu:

- a. Dimensi Kebijakan, Merupakan landasan utama bagi pengembangan dan implementasi e-government berupa dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan legal, antara lain penentuan dan penetapan dari: arah/tujuan, program kerja, tata cara atau pengaturan bagi pengembangan dan implementasi e-government di masing-masing instansi
- b. Dimensi Kelembagaan, berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan e-government
- c. Dimensi Infrastruktur, berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan e-government
- d. Dimensi Aplikasi, berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan e-government secara langsung (front office) atau tidak langsung (back office).
- e. Dimensi Perencanaan, berkaitan dengan tata kelola atau manajemen perencanaan TIK yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

Tinjauan teoritis ini ditopang oleh tinjauan legalistik yang dimana tinjauan legalistik merupakan payung hukum yang mengatur tema penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif. Yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tema penelitian. Diantaranya adalah Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kebijakan ini dilaksanakan dengan beberapa prinsip. Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti dilapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori parsons at.al maka saya menetapkan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. kualitatif

deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar.

Setelah desain penelitian ditetapkan maka saya akan mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama analisis kualitatif dari 3 tahapan. Yaitu data reduction, data display, conclusion drawing verification. Data reduksi adalah memilih dan memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan parsons at al, data display kegiatan menyajikan data yang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir conclusion drawing yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh kesimpulan akhir

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Ternate

1. Dimensi Kebijakan

Penyelenggaraan SPBE di Kota Ternate masih belum matang, dimana tanpa adanya kebijakan turunan dari Peraturan Presiden tentang SPBE tentunya penyelenggaraan kebijakan tersebut belum bisa diterapkan secara maksimal dan efektif. Adapun kebijakan yang dimaksud adalah peraturan daerah, fungsi dari peraturan daerah antara lain adalah sebagai instrument kebijakan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas perbantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang pemerintah daerah, hal ini merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang dalam hal ini adalah Peraturan Presiden tentang SPBE

Tanpa adanya kebijakan atau peraturan turunan dalam penyelenggaraan SPBE di Kota Ternate, maka hal ini akan berdampak pada keseluruhan kebijakan SPBE, dimana peraturan daerah disini posisinya sangat penting sebagai langkah awal dari pemerintah daerah Kota Ternate dalam melaksanakan kebijakan SPBE, jika pada langkah awalnya sudah terkendala tentunya pada langkah-langkah selanjutnya juga akan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Ternate tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Dimensi Kelembagaan

Dalam penyelenggaraan SPBE, keberadaan organisasi yang dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian, memiliki peran utama dalam hal pengembangan dan peningkatan urusan TIK yang mengarah kepada penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Ternate, meski secara keseluruhan SPBE diselenggarakan di seluruh OPD, akan tetapi Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian disini lebih sebagai *leading factor* dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Ternate.

3. Dimensi Infrastruktur

Dalam hal penyediaan Data Sektor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berfungsi sebagai Wali Data yang merupakan gerbang tunggal *output* Data Sektor Daerah belum dilengkapi dengan regulasi yang mengatur Tata Kelola Data Sektor Daerah. Hal ini menjadi kendala dalam pengumpulan Data sectoral dari berbagai OPD untuk dikelola, diverifikasi dan ditampung dalam Data Base Data sectoral Pemerintah Kota Ternate. Namun, berdasarkan

prinsip SPBE terkait data yang terintegrasi, maka perlu adanya data center secara keseluruhan pemerintah Kota Ternate, dan hingga saat ini hal tersebut belum bisa diwujudkan.

4. Dimensi Aplikasi

Penggunaan aplikasi di Pemerintah Kota Ternate sudah cukup baik, akan tetapi masih kurang dalam jumlah dan fungsinya, dalam hal ini pemerintah Kota Ternate perlu mengembangkan lebih banyak aplikasi fungsional, agar dapat mendukung penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Ternate yang menyeluruh dan terpadu

Penggunaan aplikasi di Pemerintah Kota Ternate pada masing-masing opd sudah cukup banyak, akan tetapi dalam pengawasan dan pengorganisasiannya sangat susah, dimana cenderung bersifat sektoral, sehingga informasi terkait penggunaan aplikasi apa saja tidak diterima secara keseluruhan oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian, hal ini disebabkan oleh belum adanya landasan hukum yang menegaskan kewenangan Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian secara lebih spesifik.

Hal ini merupakan suatu kekurangan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Ternate, padahal seharusnya inventaris aplikasi merupakan hal yang sangat penting, utamanya terkait integrasi antar OPD di Pemerintah Kota. Dimana hal ini merupakan tujuan utama dari SPBE yaitu integrasi dan keterpaduan. Untuk itu pemerintah Kota Ternate Ternate perlu memberi perhatian terhadap hal ini.

5. Dimensi Perencanaan

Terkait sistem perencanaan yang menunjang penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Ternate, pemerintah Kota melalui BAPPEDA menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate, akan tetapi dalam dokumen tersebut, berdasarkan hasil observasi penulis, tidak terdapat adanya urgensi terkait penyelenggaraan *e-government* di Kota Ternate, dalam hal ini adalah SPBE.

Perencanaan terkait penyelenggaraan SPBE di Kota Ternate dilaksanakan dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Ternate, yang dimana hal ini dilakukan untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 5 tahun oleh Perangkat Daerah Sesuai arah kebijakan Walikota yang termaktub dalam RPJMD 2021-2026 dengan Rencana Strategis SPBE Nasional.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Referensi dan perbandingan keempat penelitian yang diambil peneliti tersebut peneliti akan mencoba menganalisis lebih mendetail pada faktor-faktor yang menjadi penilaian atau ukuran Dari 5 (lima) dimensi yang telah dijelaskan diatas menggambarkan bahwa dimensi kebijakan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Ternate mempunyai peran penting, dimana pada dimensi kebijakan, penyelenggaraan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Ternate masih jauh dari kata maksimal, dimana Pemerintah Daerah seharusnya dapat menindaklanjuti Peraturan Presiden Tentang SPBE ke dalam bentuk Peraturan Daerah, yang secara lebih khusus mengatur penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Ternate. Peraturan daerah disini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan, sehingga apabila belum ada, tentunya pelaksanaan kebijakan terkait SPBE belum bisa dilaksanakan secara maksimal, mengingat karakteristik dari setiap Pemerintah Daerah berbeda-beda, sehingga urgensi dari Peraturan Daerah ini sangat diperlukan.

Pada dimensi kelembagaani, penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Ternate masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, dimana seharusnya pada Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 95 tentang SPBE sudah membentuk tim coordinator pelaksanaan SPBE, akan tetapi pada Pemerintah Kota Ternate hingga kini belum ada realisasinya, sehingga secara tidak langsung perangkat daerah

yang mengurus bidang teknologi dan informatika menjadi coordinator penyelenggaraan SPBE, dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian, akan tetapi hal itu juga masih menjadi masalah, dimana mengingat belum adanya dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan SPBE secara khusus di Pemerintah Kota Ternate, maka kewenangan Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian masih belum dapat dijalankan secara maksimal.

Selain itu, urgensi sumber daya manusia yang berkompeten juga merupakan salah satu hambatan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Ternate, formasi pegawai yang tidak sesuai dengan keahliannya juga menjadi salah satu penyebab hal ini. Namun, hal ini sudah diantisipasi oleh Pemerintah Pusat melalui pelaksanaan Pelatihan dan Workshop yang berguna mengembangkan kemampuan dari Pegawai dalam hal kompetensi yang berkaitan dengan teknologi Informasi.

Kemudian, pada dimensi infrastruktur, berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan sebelumnya, infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Ternate masih jauh dari kata lengkap, fasilitas dasar yang menunjang SPBE seperti ruang server atau data center pun belum dimiliki secara terintegrasi oleh Pemerintah Kota, meskipun terdapat server pada masing-masing OPD di Pemerintah Kota, akan tetapi tidak semuanya mempunyai fasilitas tersebut. Hal ini tentunya berdampak pada penyelenggaraan SPBE, dimana tidak bisa akan dijalankan secara maksimal dan terintegrasi apabila wadah atau fasilitas yang mendukung proses tersebut tidak ada.

Pada dimensi aplikasi, penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Ternate, terdapat beberapa aplikasi dari Pemerintah Pusat yang menunjang penyelenggaraan SPBE, baik dalam bentuk pelayanan hingga yang berkaitan dengan kepegawaian. Namun, Pemerintah Kota dalam hal ini melalui Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian tidak mempunyai atau tidak menginventarisir perihal penggunaan aplikasi di seluruh perangkat Pemerintah Kota Ternate, baik yang digunakan maupun yang diinisiasi sendiri, padahal hal ini sangat penting, mengingat salah satu tujuan dari SPBE adalah integrasi dalam penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi di Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah. Selain itu, situs web wajib yang dimiliki Pemerintah Kota secara konseptual sudah baik, akan tetapi dalam pemeliharaannya sangat kurang, dimana data yang dimuat dalam situs web Pemerintah Kota belum diperbaharui sejak tahun 2018

Pada dimensi perencanaan, penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Ternate belum matang, dimana sejak tahun 2018 hingga kini belum ada masterplan atau pedoman penyelenggaraan yang secara khusus disusun oleh Pemerintah Kota Ternate, hal ini juga dipengaruhi oleh belum adanya landasan hukum berupa peraturan daerah yang mengatur terkait penyelenggaraan SPBE, sehingga semua penyelenggaraan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 95 tentang SPBE.

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan pedoman evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Evaluasi SPBE, untuk menggambarkan tingkat kematangan serta predikat dari penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Lumajang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa, model pemerinkatan e-government berdasarkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota ternate Provinsi Maluku Utara dilihat dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan belum berjalan dengan baik. Secara keseluruhan,

perencanaan terkait penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Ternate belum matang, dimana sejak tahun 2018 hingga kini belum ada masterplan atau pedoman penyelenggaraan yang secara khusus disusun oleh Pemerintah Kota Ternate.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar struktur pelaksana yang lebih fokus pada penyediaan SPBE diluar organisasi pemerintah daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Kelembagaan ini lebih bersifat adhoc dibanding Dinas Komunikasi dan Informasi di Kota ternate.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Ternate beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A. & Setiawan, J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi Jawa Barat : CV Jejak
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B* cetakan kesembilan belas. Bandung: Alfabeta.
- Muftikhali, Q. E., & Susanto, T. D. 2017. *Kumpulan Model Maturity E-Government: Sebuah Ulasan Sistematis*. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)
- Napitupulu, D. B. 2017. *Pengujian Kerangka Kerja Perneringkatan e-Government Indonesia (PEGI): Studi Kasus di Tingkat Kementerian*. Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 20, No. 1
- Sosiawan, E. A. 2015. *Tantangan dan Hambatan dalam implementasi E-Government di Indonesia*. Jurnal Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF) Vol. 1, No. 5
- Wardiana, W. 2002. *Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia.*, Jurnal Seminar dan Pameran Teknologi Informasi 2002, Bandung: Fakultas Teknik Universitas Komputer Indonesia
- Dyah Puspito Dewi Widowati," *Survei PBB 2018 : Peringkat E-Government Indonesia*" , diakses dari <https://bpptik.kominfo.go.id>, pada tanggal 3 September 2021 pukul 03.15
- Profil Kota Ternate, diakses dari ternatekota.go.id, pada tanggal 4 September 2021 pukul 04.43
- Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diakses dari <https://spbe.go.id>, pada 3 September 2021 pukul 03.40
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 1-2
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government